BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Sejarah Dinas

1. Dinas Pendapatan Kota Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahuan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula

membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) . Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi ”*door to door*” .

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) .

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara *"door to door"* menjadi *"self assesment"* yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung dapat dilihat di lampiran.

4.1.3 *Job Description*

Untuk menunjang Program Kerja tersebut Dinas Pendapatan Kota Bandung melaksanakan Tugas Pokok Seksi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pajak Daerah, Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
c. Pelaksanaan koordinasi berkaitan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah dengan Instansi terkait.
d. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pemungutan Pajak Daerah.
e. Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan.
f. Pembinaan, evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh :

A. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas Pendapatan.
b. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran.
c. Pengkoordinasian, pengendalian dan penyusunan Laporan Keuangan.
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, pembinaan, disiplin pengembangan, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai.

B. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan.
b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan meliputi pengelolaan tata usaha, naskah dinas, kearsipan dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas Pendapatan.
c. Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengendalian Operasional Pendapatan.
e. Penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

A. Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Untuk melaksanaan tugas pokok, maka Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Oprasional.
b. Penyusunan rencana target pendapatan.
c. Pelaksanaan koordinasi rencana target pendapatan dan evaluasi pendapatan.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
e. Penyusunan konsep program Dinas Pendapatan.

B. Seksi Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengendalian Operasional.
b. Pengawasan dan Pengendalian Operasional Bidang Perencanaan., Pengendalian dan Operasional serta Pendapatan Lainnya.
c. Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Bidang Pajak Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana Bidang Pajak Daerah.
b. Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah.
c. Penyelenggaraan Pajak Daerah meliputi pendaftaran, pendataan.
d. penetapan, penagihan dan pembukuan Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pajak Daerah dibantu oleh :

A. Seksi Pendataan dan Penagihan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah.
b. Pelaksanaan administrasi Pajak Daerah.

B. Seksi Penetapan dan Pembukuan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan pengelolaan, penetapan, dan pembukuan Pajak Daerah.
b. Pelaksanaan penetapan dan pembukuan Pajak Daerah.
c. Pelaksanaan Administrasi Penetapan Pajak Daerah dan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Bidang Dana Perimbangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Dana Perimbangan.
b. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
c. Pengendalian, Evaluasi data pelaporan PBB Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
d. Pengkoordinasian kegiatan pemungutan PBB Perkotaan dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Dana Perimbangan dibantu oleh :

A. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Pelaksanaan Penyerahan SPPT PBB.
c. Pengkoordinasian pemungutan PBB dan Penyelesaian terhadap keberatan.

B. Seksi Dana Bagi Hasil

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Dana Bagi Hasil mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
b. Pelaksanaan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Mengadakan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
b. Mengadakan Pemeriksaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
c. Juru Sita Pajak Daerah.
d. Arsiparis dan Pustakawan.

7. Sumber Daya Manusia

Sebagai Dinas Teknis di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang Pendapatan Daerah, diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut.

4.1.4 Aktivitas Dinas

1. Melaksanakan kegiatan pendaftaan wajib pajak
2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak
3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak
4. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak
5. Melaksanakan kegiatan atau melayani kegiatan dari wajib pajak
6. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan
7. Melaksanakan kegiatan dan penggalian potensi pajak
8. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media
9. Melaksanakan berupa proyek Peningkatan Sumber Asli Daerah
10. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan obyek serta subyek PBB
11. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD
12. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan pengolahan data pajak

13. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan administrasi dan klarivikasi perhitungan data pajak
14. Melaksanakan kegiatan proyek penataan kearsipan data pajak
15. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
16. Melaksanakan kegiatan proyek penataan ruang kantor Dipenda
17. Melaksanakan kegiatan proyek pengadaan hardware pada payment point PLN

4.2 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 21 responden dan 1 responden mengisi untuk 2 dinas jadi total keseluruhan respinden adalah 42. Untuk variabel X ,Y dan Z kuesioner diberikan kepada objek yaitu Auditor Inspektorat Kota Bandung. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:\

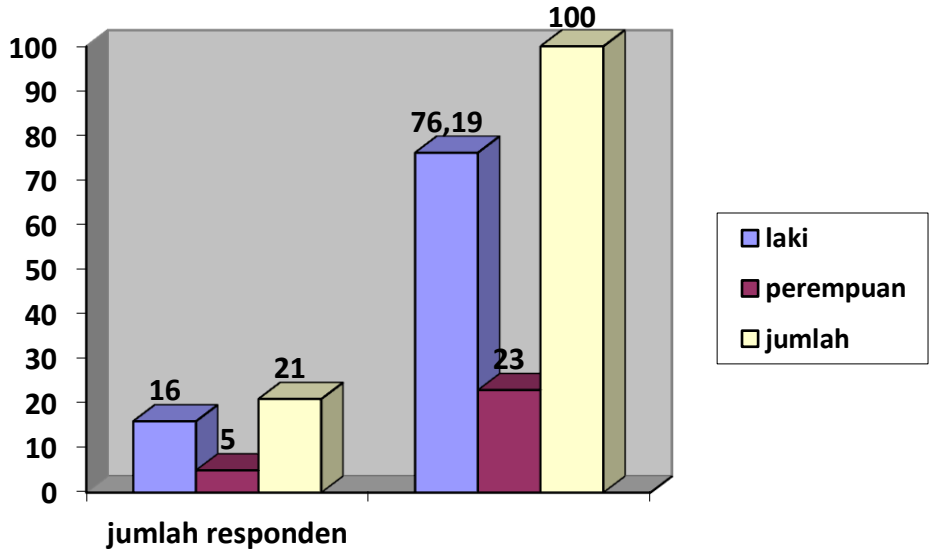
1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	16	76.19%
Perempuan	5	23.81%
Jumlah	21	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011



Grafik Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 16 orang atau sebesar 76.19% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang atau sebesar 23.81%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Auditor Inspektorat kota Bandung lebih banyak responden laki-laki, karena laki-laki lebih tegas dan lebih siap kelapangan untuk berargumentasi dan pada kenyataanya pegawai laki-laki lebih banyak dari pada perempuan pada Inspektorat Kota Bandung.

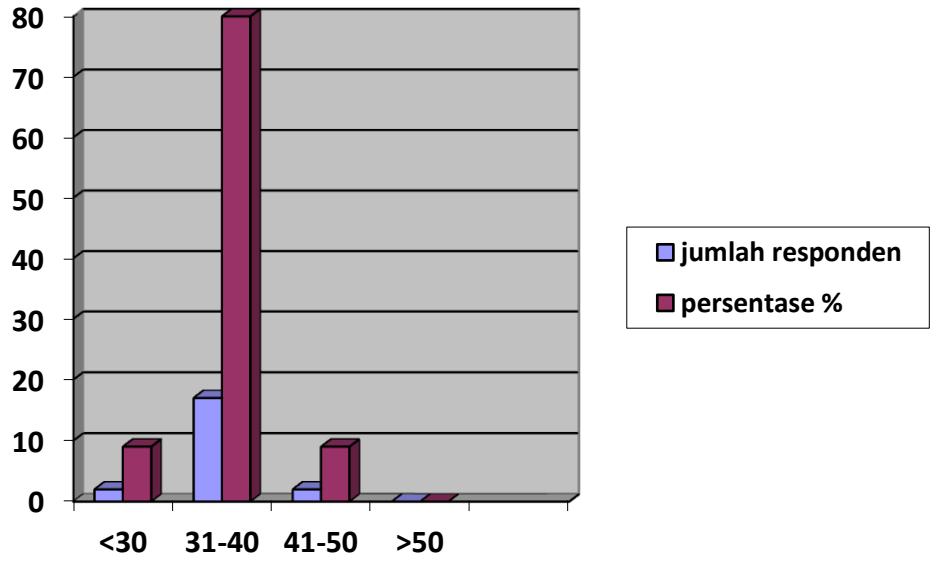
2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
<30 Tahun	2	9.52%
31-40 Tahun	17	80.96%
41-50 Tahun	2	9.52%
>50 Tahun	0	0%
Jumlah	21	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011



Grafik Profil Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 9.52%, 31-40 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 80.96%, 41-50 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 9.52%, Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Auditor Inspektorat kota Bandung lebih banyak berumur 31-40 tahun. Selain itu rata-rata usia pegawai Auditor Inspektorat kota Bandung pada Inspektorat kota Bandung berusia 31-40 tahun.

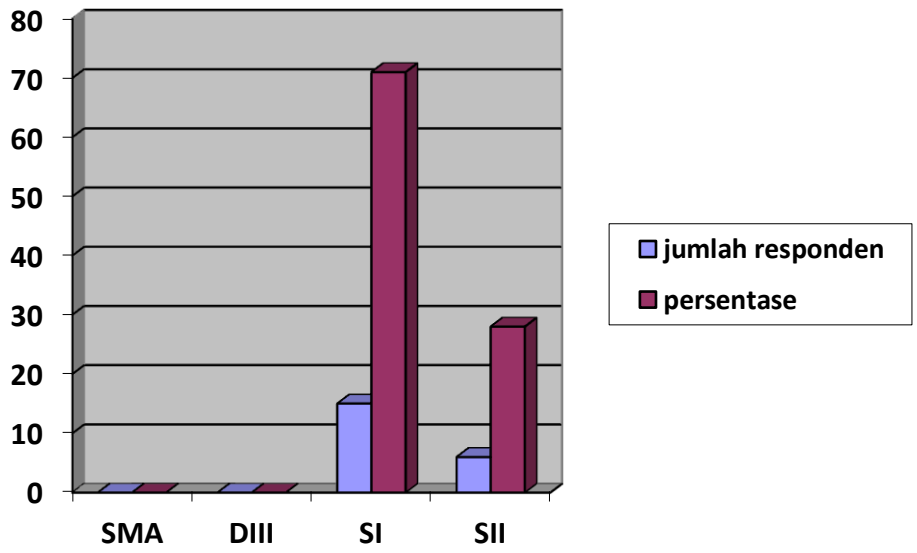
3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	0	0%
Diploma III	0	0%
Strata I (S1)	15	71.43%
Strata II (S2)	6	28.57%
Jumlah	21	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011



Grafik Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 15 orang atau sebesar 71.43% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 6 orang atau sebesar 28.57%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada

penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai Auditor Inspektorat Kota Bandung rata-rata lulusan Strata I (S1).

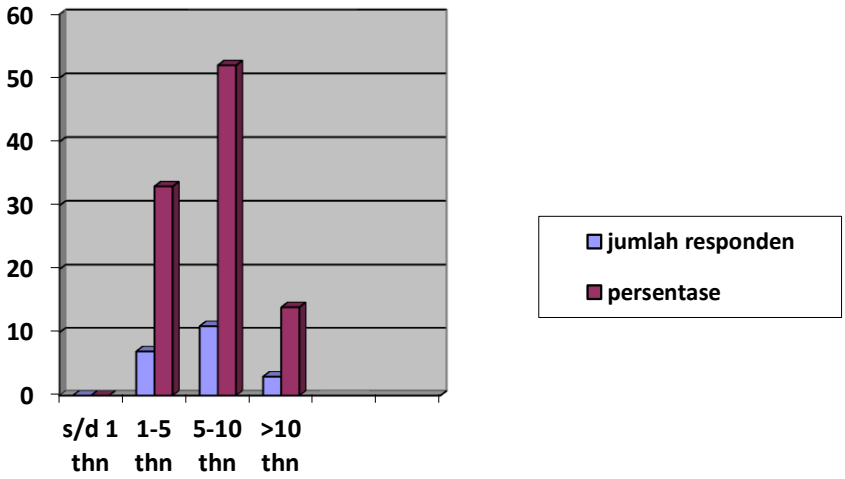
4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	0	0%
1– 5 Tahun	7	33.33%
5 – 10 Tahun	11	52.38%
>10 Tahun	3	14.29%
Jumlah	21	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011



Grafik Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dengan lama kerja 1–5 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 33.33% dan responden dengan lama kerja 5–10 tahun sebanyak 11 orang atau sebesar 52.38%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 14.29%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak 5-10 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai Auditor Inspektorat Kota Bandung pada Inspektorat Kota Bandung lebih banyak berumur 31-40 tahun. Selain itu rata-rata usia pegawai Auditor Inspektorat Kota Bandung pada Inspektorat Kota Bandung rata-rata telah bekerja antara 5-10 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Analisis Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 42 orang auditor pada Inspektorat Kota Bandung. Untuk mendapatkan gambaran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Inspektorat Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Akuntabilitas	323	420	76,90%	Baik
2.	Manajemen	1225	1890	64,81%	Cukup Baik
3.	Transparansi	256	420	60,95%	Cukup Baik
4.	Keseimbangan antar generasi	109	210	51,90%	Kurang Baik
5.	Evaluasi Kinerja	257	420	61,19%	Cukup Baik
	Total	2170	3360	64,58%	Cukup Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dikatakan sudah Cukup Baik. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa tanpa penerapan SAP, diperoleh angka konstanta peningkatan kualitan keuangan sebesar 66,16% dan dapat dikatagorikan Cukup Baik (Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh:2008). Berikut ini diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Standar Akunatansi Pemerintahan pada auditor di Inspektorat Kota Bandung berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Evaluasi kinerja akuntabilitas yang dilakukan disetiap dinas	**F**	0	0	5	19	18	181
		%	0	0	11,90	45,24	42,86	100%
2	Laporan keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit	**F**	0	3	21	17	1	142
		%	0	7,14	50,00	40,48	2,83	100%
Total		**F**	0	3	26	36	29	323
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 76,90%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 76,90% bila merujuk pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori cukup baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{323}{2x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{323}{420} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 76{,}90\%$$

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Evaluasi kinerja akuntabilitas yang dilakukan disetiap dinas pada indikator ini dan ditanggapi 42,86% responden yang menjawab Evaluasi kinerja akuntabilitas Sudah dilakukan dan sangat sesuai dengan SAP dan sebesar 45,24% responden yang berpendapat Evaluasi kinerja akuntabilitas Dilakukan sesuai dengan SAP Sisanya 11,90% menganggap bahwa Evaluasi kinerja akuntabilitas Cukup dilakukan dan sesuai dengan SAP.

Diperoleh jawaban responden mengenai Laporan keuangan yang dibuat oleh dinas yang telah diaudit oleh auditor pada Inspektorat Kota Bandung 2,83% responden menjawab Laporan keuangan yang dibuat Sangat akuntabel karena tidak terdapat kesalahan sama sekali. Namun sebesar 40,48% responden menjawab Laporan keuangan yang dibuat Akuntabel karena laporan sudah baik walaupun terdapat sedikit kesalahan tapi masih dapat di tolelir, 50,00% responden menjawab Laporan keuangan yang dibuat Cukup akuntabel. Sisanya 7,14% responden menjawab Laporan keuangan yang dibuat Kurang baik karena masih cukup banyak kesalahan yang cukup fatal.

2. Manajemen

Indikator Manajemen diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Manajemen

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	SDM yang menangani pengelolaan keuangan di dinas yang anda audit	F	0	10	22	10	0	126
		%	0	23,81	52,38	11,90	0	100%
4	Kondisi SDM yang menangani pelaporan keuangan di dinas yang anda audit dalam laporan keuangan	F	0	15	22	5	0	116
		%	0	35,71	52,38	42,86	0	100%
5	Saat melakukan audit, bagaimana sikap menajemen atau pimpinan organisasi yang sedang anda audit	F	0	11	25	6	0	121
		%	0	26,19	59,52	14,29	0	100%
6	Hasil evaluasi ditindak lanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dinas	F	0	2	22	18	0	142
		%	0	4,76	52,38	42,86	0	100%
7	tindak lanjut Hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dinas	F	0	1	26	15	0	140
		%	0	2,38	61,90	35,71	0	100%
8	Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja dinas	F	0	0	14	17	11	165
		%	0	0	33,33	40,48	26,19	100%
9	Tindak lanjut evaluasi untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja dinas	F	0	10	18	13	1	131
		%	0	23,81	42,86	30,95	2,38	100%
10	Hasil evaluasi ditindak lanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kinerja dinas	F	0	0	25	6	11	154
		%	0	0	59,52	14,29	26,19	100%
11	Tindak lanjut evaluasi untuk mengukur keberhasilan unit kinerja dinas	F	0	7	24	11	0	130
		%	0	16,67	57,14	26,19	0	100%
Total		F	0	56	198	101	23	1225
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 64,81%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1225}{9x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1225}{1890} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 64{,}81\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 64,81% termasuk dalam kategori cukup baik. Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai pertanyaan kuesioner mengenai SDM yang menangani pengelolaan keuangan di dinas yang telah diaudit oleh auditor pada Inspektorat Kota Bandung. Jawaban responden 11,90% menjawab sudah memadai SDM yang menangani pengelolaan keuangan karena SDM mampu dalam mengelola keuangan. Dan sebesar 52,38% responden yang berpendapat Cukup memadai karena SDM mampu dalam mengelola keuangan. Sisanya 23,81% menganggap bahwa Kurang memadai karena SDM kurang mampu dalam mengelola keuangan.

Diperoleh jawaban responden mengenai Kondisi SDM yang menangani pelaporan keuangan di dinas yang telah diaudit oleh auditor dalam laporan keuangan dan sebesar 42,86% responden menjawab memadainya SDM yang menangani pelaporan keuangan di dinas yang telah diaudit oleh auditor dalam laporan keuangan dan 52,38% responden menjawab Cukup memadai SDM yang menangani pelaporan keuangan di dinas yang telah diaudit oleh auditor dalam laporan keuangan dan 35,71% responden menjawab Kurang memadai SDM yang menangani pelaporan keuangan di dinas yang telah diaudit oleh auditor dalam laporan keuangan.

Diperoleh jawaban responden mengenai, bagaimana sikap menajemen atau pimpinan organisasi yang sedang diaudit, 14,29% responden menjawab sikap menajemen atau pimpinan organisasi Bekerjasama dengan baik dan memberikan semua data yang diminta sehingga proses audit lancar. Dan sebesar 59,52% responden menjawab sikap menajemen atau pimpinan organisasi Biasa saja dan

26,19% responden menjawab sikap menajemen atau pimpinan organisasi Kurang merespon dengan baik dan terlihat kurang siap saat auditor meminta data yang di perlukan.

Diperolehjawaban responden mengenai Hasil evaluasi ditindak lanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dinas 42,86% responden menjawab Hasil evaluasi telah Diperbaiki dan sebesar 52,38% responden menjawab Hasil evaluasi Cukup Diperbaiki dan 4,76% responden menjawab Hasil evaluasi kurang Diperbaiki.

Jawaban responden mengenai tindak lanjut Hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dinas, diperoleh jawaban responden 35,71% responden yang menjawab tindak lanjut Hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dinas Diperhatikan. Dan sebesar 61,90% responden menjawab dak lanjut Hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dinas Cukup Diperhatikan. Sisanya 2,38% responden menjawab dak lanjut Hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dinas Kurang Diperhatikan.

Diperoleh jawaban responden mengenai Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja dinas, diperoleh jawaban 26,19% responden yang menjawab Telah ditindaklanjuti dan bertujuan untuk perbaikan penerapan manajeman kinerja. Dan sebesar 40,48% responden menjawab Telah ditindaklanjuti. Sisanya 33,33% responden menjawab Cukup ditindaklanjuti.

Jawaban responden mengenai Tindak lanjut evaluasi untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja dinas, diperoleh jawaban responden 2,38% yang

menjawab Sangat Diperhatikan. Dan sebesar 30,95% responden menjawab Diperhatikan dan 42,86% responden menjawab Cukup Diperhatikan, sisanya 23,81% responden menjawab Kurang diperhatikan.

Diperoleh jawaban responden mengenai Hasil evaluasi yang ditindak lanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kinerja dinas, diperoleh jawaban responden sebesar 26,19% yang menjawab Telah ditindaklanjuti dan bertujuan untuk mengukur keberhasilan unit kinerja, selanjutnya 14,29% responden menjawab Telah ditindaklanjuti dan sisanya 59,52% responden menjawab belum ditindaklanjuti

Diperoleh jawaban responden Tindak lanjut evaluasi untuk mengukur keberhasilan unit kinerja dinas 26,19% responden menjawab Diperhatikan dan sebesar 57,14% responden menjawab Cukup Diperhatikan dan 16,67% responden menjawab Kurang Diperhatikan.

3. Transparansi

Indikator Transparansi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Transparansi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
12	hasil audit atas kinerja yang dinilai sesuai dengan unsur keterbukaan dalam informasi keuangan memenuhi kriteria	F	0	5	26	11	0	132
		%	0	11,90	61,90	26,19	0	100%
13	hasil audit atas kinerja yang dinilai dengan unsur kejujuran dalam informasi keuangan belum memenuhi kriteria	F	0	9	26	7	0	124
		%	0	21,43	61,90	16,67	0	100%
Total		F	0	14	52	18	0	256
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 60,95%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{256}{2x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{256}{420} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 60{,}95\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 60,95% bila merujuk pada tabel 4.8 termasuk dalam kategori cukup baik.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai hasil audit atas kinerja yang dinilai sesuai dengan unsur keterbukaan dalam informasi keuangan memenuhi kriteria pada indikator ini ditanggapi jawaban responden sebesar 26,19% yang menjawab hasil audit atas kinerja yang dinilai sesuai dengan unsur keterbukaan dalam informasi keuangan memenuhi kriteria yaitu RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK, LAKIP. Dan sebesar 61,90% responden yang berpendapat hasil audit atas kinerja yang dinilai sesuai dengan unsur keterbukaan dalam informasi keuangan memenuhi kriteria yaitu RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK. Sedangkan 11,90% responden menganggap hasil audit atas kinerja yang dinilai sesuai dengan unsur keterbukaan dalam informasi keuangan memenuhi kriteria yaitu RPJMD/Renstra, RKPD/RKT

Diperoleh jawaban responden mengenai hasil audit atas kinerja yang dinilai dengan unsur kejujuran dalam informasi keuangan belum memenuhi kriteria dan sebesar 16,67% responden menjawab hasil audit atas kinerja yang dinilai dengan unsur kejujuran dalam informasi keuangan yang belum memenuhi

kriteria Yaitu RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK, LAKIP dan 61,90% responden menjawab hasil audit atas kinerja yang dinilai dengan unsur kejujuran dalam informasi keuangan yang belum memenuhi kriteria yaitu RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK dan 21,43% responden menjawab RPJMD/Renstra, RKPD/RKT.

4. Keseimbangan antar generasi

Indikator Keseimbangan antar generasi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Keseimbangan antar Generasi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
14	tenaga akuntan yang dimiliki setiap dinas setiap tahunnya	F	2	16	21	3	0	109
		%	4,76	38,10	50,00	7,14	0	100%
Total		F	2	16	21	3	0	109
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 51,90%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{109}{1x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{109}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 51{,}90\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 51,90%, bila merujuk pada tabel 4.9 termasuk dalam kategori Kurang baik.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai tenaga akuntan yang dimiliki setiap dinas setiap tahunnya pada indikator ini ditanggapi

oleh jawaban responden sebesar 7,14% yang menjawab tenaga akuntan yang dimiliki setiap dinas setiap tahunnya yaitu sebesar 8 – 10. Dan diperoleh jawaban responden sebesar 50,00% yang berpendapat tenaga akuntan yang dimiliki setiap dinas setiap tahunnya yaitu sebesar 5-8 tenaga akuntan. Sedangkan 38,10% responden menganggap tenaga akuntan yang dimiliki setiap dinas setiap tahunnya yaitu sebesar 2-5 tenaga akuntan dan sisanya 4,76% responden menjawab tenaga akuntan yang dimiliki setiap dinas setiap tahunnya yaitu sebesar Kurang dari 2 tenaga akuntan.

5. Evaluasi Kinerja

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Evaluasi Kinerja

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
15	Kinerja pencatatan laporan keuangan sesuai dengan kriteria	F	0	8	22	12	0	130
		%	0	19,05	52,38	28,57	0	100%
16	evaluasi atas pemanfaatan LAKIP SKPD memenuhi kriteria	F	0	7	27	8	0	127
		%	0	16,67	64,29	19,05	0	100%
Total		F	9	15	49	20	0	257
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 61,19%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{257}{2x5x42} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{219}{420} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 61{,}19\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 61,19%, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori cukup baik.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Kinerja pencatatan laporan keuangan sesuai dengan kriteria pada indikator ini ditanggapi oleh 28,57% responden yang berpendapat Kinerja pencatatan laporan keuangan memenuhi. Sedangkan 52,38% responden menganggap Kinerja pencatatan laporan keuangan Cukup memenuhi. Sisanya 19,05% menganggap bahwa Kinerja pencatatan laporan keuangan Kurang memenuhi.

Diperoleh jawaban responden mengenai evaluasi atas pemanfaatan LAKIP SKPD memenuhi kriteria dan sebesar 19,05% responden menjawab memenuhi dan 64,29% responden menjawab Cukup memenuhi dan 16,67% responden menjawab Kurang memenuhi.

4.3.2 Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 42 orang auditor pada Inspektorat Kota Bandung. Untuk mendapatkan gambaran Kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Inspektorat Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai
Kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	**Relevan**	**261**	**420**	**62,14%**	**Cukup Baik**
2.	**Andal**	**490**	**840**	**58,33%**	**Cukup Baik**
3.	**Dapat Dibandingkan**	**244**	**420**	**58,10%**	**Cukup Baik**
4.	**Dapat Dipahami**	**461**	**840**	**54.88%**	**Cukup Baik**
	Total	**1456**	**2520**	**57,78%**	**Cukup Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 57,78% maka dapat disimpulkan bahwa Kuliatas Laporan Keuangan dianggap sudah cukup baik. Hal ini didasarkan dari Tabel Kriteria Presentase Tanggapan Responden menurut Umi Narimawati:2007, dengan hasil skor tanggapan responden sebesar 57,78%, termasuk dalam katagori cukup baik.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Inspektorat Kota Bandung berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Relevan

Indikator Relevan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Relevan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
17	kualitas pengukuran kinerja dalam pembuatan laporan keuangan dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini	**F**	0	11	21	10	0	125
		%	0	26,19	50,00	23,81	0	100%
18	Laporan keuangan dinas sesuai dengan sasaran yang akan diukur	**F**	0	6	20	16	0	136
		%	0	14,29	47,62	38,10	0	100%
Total		**F**	4	17	41	26	0	261
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 62,14%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{261}{2x5x42} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{221}{420} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 62,14\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 62,14%, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori Cukup baik.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai kualitas pengukuran kinerja dalam penbuatan laporan keuangan dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini pada indikator ini ditanggapi oleh 23,81% responden yang berpendapat dapat dievaluasi. Sedangkan 50,00% responden Cukup dapat dievaluasi. Sisanya 26,19% menganggap bahwa kurang dapat dievaluasi.

Diperolehjawaban responden mengenai Laporan keuangan dinas sesuai dengan sasaran yang akan diukur dan sebesar 38,10% responden menjawab dapat

diukur dan 47,62% responden menjawab cukup dapat diukur dan 14,29% responden menjawab kurang dapat diukur.

2. Andal

Indikator Andal diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Andal

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
19	Informasi mengenai pencapaian IKU (indicator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas telah disajikan	F	2	9	24	7	0	120
		%	4,76	21,43	57,14	16,67	0	100%
20	Pencapaian IKU (indicator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas memuat informasi	F	5	11	20	6	0	111
		%	11,90	26,19	47,62	14,29	0	100%
21	Pengumpulan data kinerja antara realisasi anggaran	F	0	9	18	15	0	132
		%	0	21,43	42,86	35,71	0	100%
22	Penyajian laporan keuangan dinas	F	0	9	23	10	0	127
		%	0	21,43	54,76	23,81	0	100%
Total		F	7	38	85	38	0	490
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 58,33%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{490}{4x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{490}{840} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 58{,}33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 58,33%, bila merujuk pada tabel 4.13 termasuk dalam kategori cukup baik.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Informasi mengenai pencapaian IKU (indikator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas, diperoleh tanggapan responden 16,67% yang menjawab Informasi mengenai pencapaian IKU (indikator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas telah Sesuai fakta. Dan sebesar 57,14% responden yang berpendapat Informasi mengenai pencapaian IKU (indikator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas sudah Cukup sesuai fakta, 21,43% responden Informasi mengenai pencapaian IKU (indikator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas Kurang sesuai fakta Sisanya 4,76% menganggap bahwa Informasi mengenai pencapaian IKU (indikator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas Tidak sesuai fakta.

Diperoleh jawaban responden mengenai Pencapaian IKU (indicator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas memuat informasi, 14,29% responden yang menjawab Pencapaian IKU (indicator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas memuat informasi memenuhi kriteria dan sebesar 47,62% responden menjawab Pencapaian IKU (indicator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas memuat informasi sudah cukup memenuhi kriteria dan 26,19% responden menjawab Pencapaian IKU (indikator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas memuat informasi kurang memenuhi kriteria dan 11,90%

responden menjawab Pencapaian IKU (indikator kinerja utama) dalam laporan keuangan yang disampaikan dinas memuat informasi tidak memenuhi kriteria.

Diperoleh jawaban responden mengenai Pengumpulan data kinerja antara realisasi anggaran, 35,71% yang menjawab Pengumpulan data kinerja antara realisasi anggaran telah tercapai. Dan sebesar 42,86% responden menjawab Pengumpulan data kinerja antara realisasi anggaran cukup tercapai dan 21,43% responden menjawab Pengumpulan data kinerja antara realisasi anggaran Kurang tercapai.

Diperoleh jawaban responden mengenai Penyajian laporan keuangan dinas dan sebesar 23,81% responden menjawab Penyajian laporan keuangan dinas sudah terukur dan 54,76% responden menjawab Penyajian laporan keuangan dinas Cukup terukur dan 21,43% responden menjawab Penyajian laporan keuangan dinas kurang terukur

3. Dapat dibandingkan

Indikator Dapat dibandingkan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dapat Dibandingkan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
23	Data kinerja yang memadai antara realisasi tahun sekarang dengan realisasi tahun sebelumnya dalam LAKIP	F	0	11	19	12	0	127
		%	0	26,19	45,24	28,57	0	100%
24	Data kinerja yang memadai antara realisasi tahun sekarang dengan realisasi tahun sebelumnya dalam LAKIP	F	0	14	23	5	0	117
		%	0	33,33	55,76	11,90	0	100%
Total		F	0	25	42	17	0	244
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 58,10%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{244}{2x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{244}{420} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 58{,}10\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 58,10%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori cukup baik.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Data kinerja yang memadai antara realisasi tahun sekarang dengan realisasi tahun sebelumnya dalam LAKIP pada indikator ini ditanggapi oleh 28,57% responden yang berpendapat dapat dibandingkan. Sedangkan 45,24% responden cukup dapat dibandingkan,. Dan sisanya 26,19% responden yang menjawab kurang dapat dibandingkan.

Diperolehjawaban responden mengenai Data kinerja yang memadai antara realisasi tahun sekarang dengan realisasi tahun sebelumnya dalam LAKIP dan sebesar 11,90% responden menjawab dapat diandalkan dan 55,76% responden menjawab cukup dapat diandalkan. Dan hanya 33,33% responen yang menjawab kurang dapat dibandingkan.

4. Dapat dipahami

Indikator dapat dipahami diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dapat Dipahami

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
25	informasi yang disajikan digunakan untuk peningkatan kinerja evaluasi atas pemanfaatan LAKIP SKPD	F	4	14	16	8	0	112
		%	9.52	33,33	38,10	19,05	0	100%
26	Kualitas pengukuran kinerja untuk mengukur sasarannya	F	4	11	23	4	0	111
		%	9,52	26,19	54,76	9,52	0	100%
27	Kualitas pengukuran kinerja untuk mengukur target	F	1	13	22	6	0	117
		%	2,38	30,95	52,38	14,29	0	100%
28	Kualitas pengukuran kinerja untuk mengukur kinerja jangka menengah	F	2	9	23	8	0	121
		%	4,76	21,43	54,76	19,05	0	100%
Total		F	11	47	84	26	0	461
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 54,88%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{461}{4x5x42} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{461}{840} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 54{,}88\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 54,88%, bila merujuk pada tabel 4.15 termasuk dalam kategori cukup baik.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai informasi yang disajikan digunakan untuk peningkatan kinerja evaluasi atas pemanfaatan LAKIP SKPD pada indikator ini ditanggapi oleh 38,10% responden yang berpendapat cukup memenuhi kriteria. Sedangkan 33,33% responden kurang memenuhi kriteria Sisanya 9.52% menganggap bahwa tidak memenuhi kriteria.

Diperoleh jawaban responden mengenai Kualitas pengukuran kinerja untuk mengukur sasaran dan sebesar 54,76% responden menjawab Cukup

mencukupi dan 26,19% responden menjawab Kurang mencukupi dan 9,52% responden menjawab Tidak mencukupi sisanya 9,52% menjawab mencukupi.

Dan jawaban responden mengenai Kualitas pengukuran kinerja untuk mengukur target dan sebesar 52,38% responden cukup mencukupi dan 30,95% responden menjawab kurang mencukupi, 14,29% yang menjawab mencukupi dan sisanya 2,38% responden tidak mencukupi.

Diperoleh jawaban responden mengenai Kualitas pengukuran kinerja untuk mengukur kinerja jangka menengah dan sebesar 54,76% responden menjawab Cukup mencukupi dan 21,43% responden menjawab Kurang mencukupi, 19,05% responden yang menjawab mencukupi dan 4,76% responden menjawab Tidak mencukupi.

4.3.4 Analisis Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 42 orang auditor pada Inspektorat Kota Bandung. Untuk mendapatkan gambaran Akuntabilitas di Inspektorat Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Akuntabilitas

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Integritas Keuangan	**264**	**420**	**62,86%**	**Cukup Baik**
2.	Pengungkapan	**117**	**210**	**55,71%**	**Cukup Baik**
3.	Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan	**253**	**420**	**60,24%**	**Cukup Baik**
	Total	**634**	**1050**	**60,38%**	**Cukup Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 60,38% maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dianggap sudah cukup baik. Hal ini didasarkan dari Tabel Kriteria Presentase Tanggapan Responden menurut Umi Narimawati:2007, dengan hasil skor tanggapan responden sebesar 60,38% dan nilai tersebut termasuk dalam katagori cukup baik.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Akuntabilitas berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Integritas Keuangan

Indikator Integritas Keuangan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Integritas Keuangan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
29	pengukuran atas IKU (indicator kinerja utama tidak ada) yang dilakukan dinas	F	0	9	21	12	0	129
		%	0	21,43	50,00	28,57	0	100%
30	pengukuran realisasi dan pengumpulan data kinerja	F	0	8	17	17	0	135
		%	0	19,05	40,48	40,48	0	100%
Total		F	0	17	38	29	0	264
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 62,86%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.17 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{264}{2x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{264}{420} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 62,86\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 62,86%, bila merujuk pada tabel 4.17 termasuk dalam kategori Cukup baik.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran pengukuran atas IKU (indikator kinerja utama tidak ada) yang dilakukan dinas pada indikator ini ditanggapi oleh 50,00% responden yang berpendapat cukup dibutuhkan. Sedangkan 28,57% responden dibutuhkan Sisanya 21,43% menganggap bahwa kurang dibutuhkan

Diperoleh jawaban responden mengenai pengukuran realisasi dan pengumpulan data kinerja dan sebesar 40,48% responden menjawab dapat diandalkan dan 40,48% responden menjawab cukup dapat diandalkan, 19,05% yang menjawab kurang dapat diadalkan.

2. Pengungkapan

Indikator Pengungkapan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengungkapan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
31	akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di pusat dan informasi yang disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	F	2	10	24	6	0	117
		%	4,76	26,19	54,76	14,29	0	100%
Total		F	2	10	24	6	0	117
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 55,71%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.18 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{117}{1x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{117}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 57{,}71\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 57,71%, bila merujuk pada tabel 4.18 termasuk dalam kategori cukup baik.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran pengukuran atas akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di pusat dan informasi yang disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada indikator ini ditanggapi oleh 54,76% responden yang berpendapat cukup tersedia. Sedangkan 26,19% responden kurang tersedia, 14,29% yang menjawab tersedia. Sisanya 4,76% menganggap bahwa tidak tersedia.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Tabel 4.19
Distribusi Jawaban Responden Mengenai

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
32	Penggunaan penetapan peraturan nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapn indicator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah sebagai dasar IKU	F	0	11	16	15	0	130
		%	0%	26,19%	38,10%	35,71%	0	100%
33	pedoman pengumpulan data kinerja dinas	F	0	11	23	8	0	123
		%	0%	26,19%	54,76%	19,05%	0	100%
Total		F	0	22	39	23	0	253
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 60,24%								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{253}{2x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{253}{420} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 60{,}24\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 60,24%, bila merujuk pada tabel 4.19 termasuk dalam kategori cukup baik.

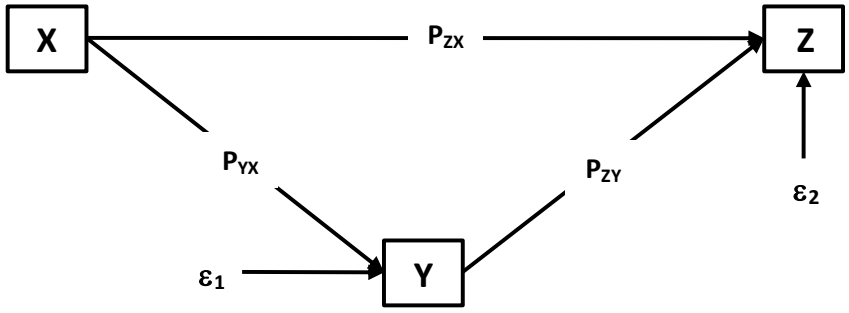
Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran Penggunaan penetapan peraturan nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapn indicator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah sebagai dasar IKU pada indikator ini ditanggapi oleh 38,10% responden yang berpendapat Cukup disyaratkan. Sedangkan 35,71% responden disyaratkan Sisanya 26,19% menganggap bahwa Kurang disyaratkan

Diperoleh jawaban responden mengenai pedoman pengumpulan data kinerja dinas dan sebesar 54,76% responden menjawab cukup tersedia dan 26,19% responden menjawab kurang tersedia, Dan sisanya 19,05% responden yang menjawab tersedia.

4.4. Analisis Verifikatif

Semakin baik Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga Akuntabilitas diharapkan juga akan semakin meningkat. Berdasarkan data yang terkumpul, pada

penelitian ini akan diuji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kemudian pada tahap kedua akan diuji Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya pada Akuntabilitas. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1

Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Sumber: Umi Narimawati 2011

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut.

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$\mathbf{Y = P_{YX}X + \varepsilon_1}$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$\mathbf{Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \varepsilon_2}$$

Keterangan:
Z = Akuntabilitas
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
X = Standar Akuntansi Pemerintahan
P_{YX} = Koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
P_{ZX} = Koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas
P_{ZY} = Koefisien jalur Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas
ε = Pengaruh faktor lain

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel penelitian (skala ordinal), maka sebelum menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya pada Akuntabilitas, terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.*

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan software *SPSS 17.0* dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut:

Tabel 4.20
Pedoman Pengklasifikasian Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat rendah
2	0,200 – 0,399	Rendah
3	0,400 – 0,599	Sedang
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2009 : 250

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X), variabel intervening Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan variabel dependen Akuntabilitas (Z), koefisien korelasi diantara ketiga variabel bebas tersebut dihitung menggunakan rumus berikut

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[(n \sum X^2 - (\sum X)^2) \times (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)]}}$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,576. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dengan Akuntabilitas (Z) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{XZ} = \frac{n\sum XZ - \sum X \sum Z}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Z^2 - \left(\sum Z\right)^2\right)\right]}}$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dengan Akuntabilitas (Z) sebesar 0,587. Selanjutnya dihitung koefisien

korelasi antara Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan Akuntabilitas (Z) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{n \sum YZ - \sum Y \sum Z}{\sqrt{[(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2) \times (n \sum Z^2 - (\sum Z)^2)]}}$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan Akuntabilitas (Z) sebesar 0,702. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 17.0* diperoleh koefisien korelsi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.21
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Z	X	Y
Pearson Correlation	Z	1,000	,587	,708
	X	,587	1,000	,576
	Y	,708	,576	1,000
Sig. (1-tailed)	Z	.	,000	,000
	X	,000	.	,000
	Y	,000	,000	.
N	Z	42	42	42
	X	42	42	42
	Y	42	42	42

Sumber: Data yang telah diolah *SPSS 17.0* ,2011

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintaha (X) dangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,576 dan masuk dalam kategori sedang. Arah hubungan positif antara Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menujukkan bahwa Standar Akuntansi

Pemerintahan yang baik akan diikuti dengan peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dengan Akuntabilitas (Z) sebesar 0,587 termasuk dalam kategori sedang, demikian juga hubungan antara Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan Akuntabilitas (Z) sebesar 0,708 termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif.

4.4.1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas Secara Parsial.

Karena dari hasil pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat lebih jelas variabel mana saja diantara kedua variabel independen, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pengaruhnya signifikan terhadap Akuntabilitas. Untuk menguji koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen tersebut digunakan uji t, dengan formula sebagai berikut:

$$t_i = \frac{P_{ZXi}}{\sqrt{\frac{\left(1-R^2_{Z.XY}\right)\times C_{ii}}{\left(n-k-1\right)}}}$$

4.4.1.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas

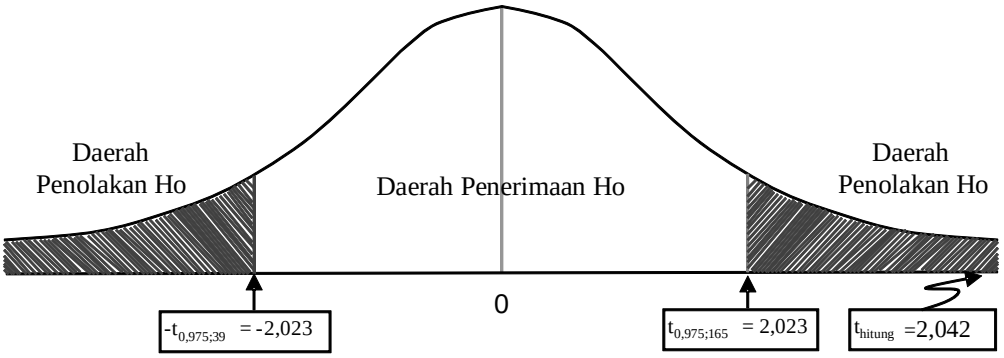
Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZX} = 0$ Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas

Ha: $\rho_{ZX} \neq 0$: Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas

$$\text{Statistik uji: } t_{hitung} = \frac{0,268}{\sqrt{\frac{(1-0,550)x1,497}{(42-2-1)}}} = 2,042$$

Nilai statistik uji t sebesar 2,042 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.20, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel. Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 39 diperoleh nilai sebesar 2,023. Karena t_{hitung} (2,042) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,023) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.



Gambar 4.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas

Pada gambar 4.6 dapat dilihat t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas

4.4.1.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas

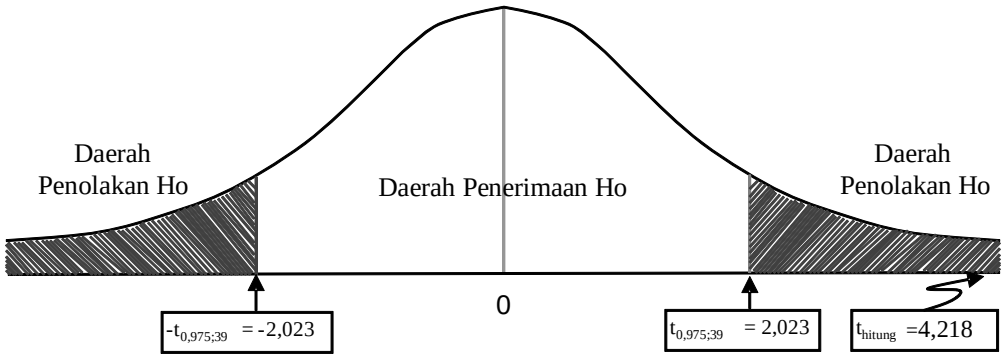
Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZY} = 0$ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas

Ha: $\rho_{ZY} \neq 0$: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas

$$\text{Statistik uji: } t_{hitung} = \frac{0{,}554}{\sqrt{\frac{(1-0{,}550)x1{,}497}{(42-2-1)}}} = 4{,}218$$

Nilai statistik uji t sebesar 4,218 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.20, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel. Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 39 diperoleh nilai sebesar 2,021. Karena t_{hitung} (4,218) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,042) maka pada tingkat kekelialruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.



Gambar 4.3
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas

Pada gambar 4.7 dapat dilihat t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.

4.4.2. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas Secara Simultan

4.4.2.1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pada sub struktur yang pertama variabel Standar Akuntansi Pemerintahan berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (Standar Akuntansi Pemerintahan), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$(P_{YX}) = r_{xy} = (0{,}576)$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 17.0* diperoleh koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.22
Koefisien Jalur Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7,617	5,459		1,395	,171
	X	,594	,133	,576	4,453	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang telah diolah *SPSS 17.0* ,2011

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,576 pada tabel 4.23 merupakan nilai koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2_{Y1} = \left(P_{YX}\right)^2 = (0{,}576)^2$$

$$= 0{,}331$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 17.0* diperoleh koefisien determinasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut.

Tabel 4.23
Koefisien Determinasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

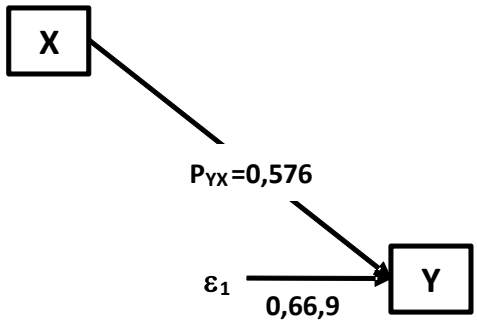
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	,576[a]	,331	,315	5,39847	,331	19,830	1	40	,000

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh sebesar 33,1% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung, sementara sisanya sebesar 66,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Standar Akuntansi Pemerintahan. Yaitu diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana,Transparansi (Purnawiati Nugraheni dan Imam Subaweh 2008).



Gambar 4.4 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

3) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

$H_0 : \rho_{YX} = 0$ Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

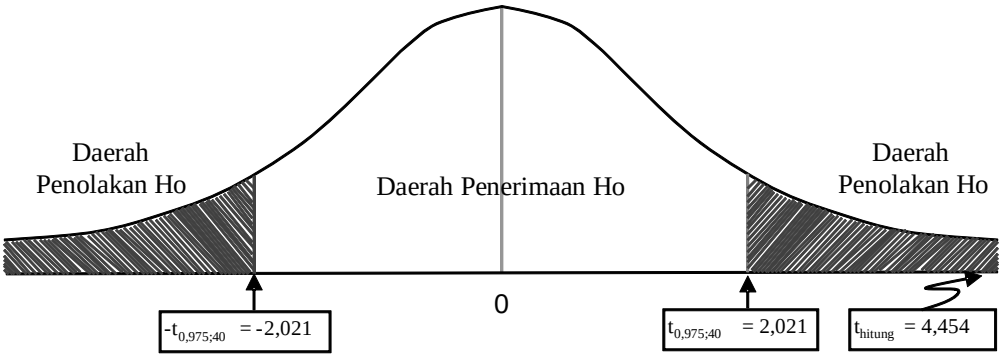
$H_1 : \rho_{YX} \neq 0$ Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menguji hipotesisi diatas digunakan uji t dengan formula sebagai berikut:

$$t = \frac{P_{YX}}{\sqrt{\frac{(1-R^2_{YX})}{n-2}}}$$

$$t = \frac{0,576}{\sqrt{\frac{(1-0,331)}{42-2}}} = 4,454$$

Jadi diperoleh nilai statistik uji t sebesar 4,454 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.23 (coefsie) Kriteria pengujiannya adalah, "Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$", dimana dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 40 diperoleh nilai t sebesar 2,021. Karena t_{hitung} (4,454) lebih kecil dibanding t_{tabel} (2,021) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung.



Gambar 4.5
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada gambar 4.3 dapat dilihat t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung.

4.4.2.2. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas

Pada sub struktur yang kedua variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan Akuntabilitas sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyususn matriks korelasi antar variabel independen, dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}000 & 0{,}576 \\ 0{,}576 & 1{,}000 \end{bmatrix} \end{array}$$

2) Menghitung invers dari matriks korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}497 & -0{,}862 \\ -0{,}862 & 1{,}497 \end{bmatrix} \end{array}$$

3) Menyusun matrik korelasi antara variabel independen (Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan Akuntabilitas.

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} Z \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0{,}708 \\ 0{,}576 \end{bmatrix} \end{array}$$

4) Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel penyebab dengan variabel akibat.

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,497 & -0,862 \\ -0,862 & 1,497 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 0,708 \\ 0,576 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,268 \\ 0,554 \end{bmatrix}$$

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,268 dan koefisien jalur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,554 Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 17.0* diperoleh koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas sebagai berikut.

Tabel 4.24
Koefisien Jalur Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,077	2,014		-,038	,970
	X	,120	,059	,268	2,042	,048
	Y	,240	,057	,554	4,218	,000

a. Dependent Variable: Z

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,268 dan 0,554 pada tabel 4.24merupakan nilai koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas.

5) Menghitung Koefisien Determinasi.

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel independen dengan Akuntabilitas.

$$R^2_{Z(XY)} = \begin{bmatrix} 0{,}268 & 0{,}554 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}708 \\ 0{,}576 \end{bmatrix}$$

$$= 0{,}550$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software SPSS.17* diperoleh koefisien determinasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas sebagai berikut.

Tabel 4.25

Koefisien Determinasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,742[a]	,550	,527	1,94498	,550	23,840	2	39	,000

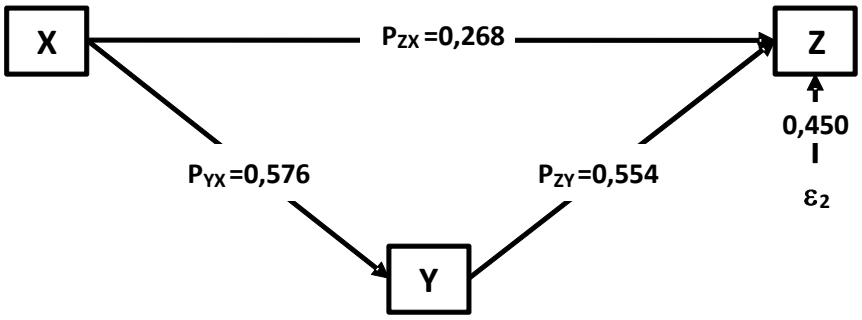
a. Predictors: (Constant), Y, X

b. Dependent Variable: Z

Sumber: Data yang telah diolah *SPSS 17.0* ,2011

Melalui nilai koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 55,0% terhadap kepatuhan Akuntabilitas pada Dinas Bandung. Sisanya sebesar 45,0%

merupakan pengaruh faktor lain yaiu diantaranya transparansi, Modernisasi Administrasi Perpajakan (Dianasari,Rachmawati, Rima 2010), dan diluar kedua variabel yang sedang diteliti. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap Akuntabilitas pada Dinas Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.6 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

Melalui diagram jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut.

a) Besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.

Pengaruh langsung Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas $= (P_{ZX})^2$ = (0,268) x (0,268) = 0,0718 (7,18%). Pengaruh tidak langsung Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas = P_{ZX} x r_{XY} x P_{ZY} = (0,268) x (0,576) x (0,554) = 0,0855(8,55%).

Jadi total pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung. = 7,18% + 8,55% = 15,73% dengan arah positif. Artinya Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik akan meningkatkan Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.

b) Besar pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung..

Pengaruh langsung Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas $= (P_{ZY})^2$ = (0,554) x (0,554) = 0,307 (30,7%). Pengaruh tidak langsung Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas = P_{ZY} x r_{XY} x P_{ZX} = (0,554) x (0,576) x (0,268) = 0,0855(8,55%).

c) Jadi total pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.. = 30,7% + 8,55% = 39,25% dengan arah positif. Artinya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik akan meningkatkan Akuntabilitas.

6) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan pengaruh yang signfikan terhadap Akuntabilitas n baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian ara parsial.dan dilanjutkan dengan pengujian secara simultan

Hipotesis Statistik:

Ho: $\rho_{ZX} = \rho_{ZY} = 0$ Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas

Ha: $\rho_{ZX} \neq \rho_{ZY} \neq 0$ Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas

Untuk menguji hipotesis diatas digunakan uji F dengan formula sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(n-k-1)R^2_{Z(XY)}}{k(1-R^2_{Z(XY)})}$$

$$F_{hitung} = \frac{(42\text{-}2\text{-}1)X0{,}550}{2X(1\text{-}0{,}550)}$$

$$= 23{,}840$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 17.0* diperoleh nilai F_{hitung} pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas sebagai berikut.

Tabel 4.26
Uji Anova Untuk Uji Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	180,369	2	90,185	23,840	,000[a]
	Residual	147,536	39	3,783		
	Total	327,905	41			

a. Predictors: (Constant), Y, X

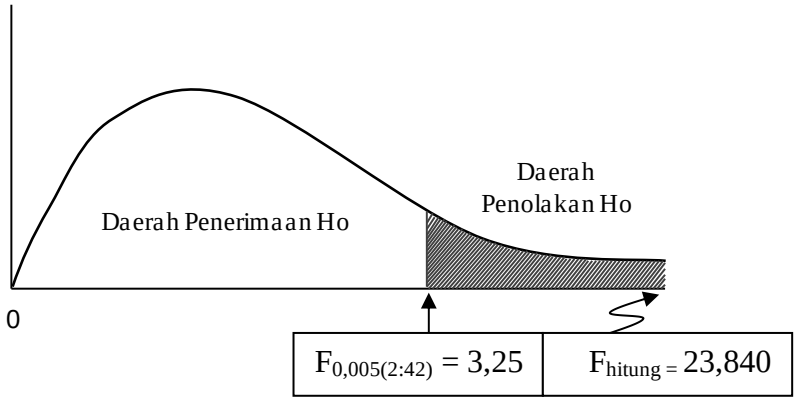
b. Dependent Variable: Z

Sumber: Data yang telah diolah *SPSS 17.0* ,2011

Berdasarkan tabel pengujian diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 23,840 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000. Sementara dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;42-2-1) diperoleh $F_{0,005(2:42)}$ = 3,25. Karena F_{hitung} (23,840) lebih besar dibanding F_{tabel} (3,25) maka pada tingkat

kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung sebesar 55,0%, sedangkan sisanya sebesar 45,0% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut.



Gambar 4.7
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas

Pada gambar 4.5 dapat dilihat F_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.